



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....
di
.....

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPI) MASA
PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)**

A. Identitas Pemotong Pajak/Wajib Pajak :

N P W P :
N a m a :
A l a m a t :

B. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) yang telah dipotong/dipungut/terutang untuk masa tahun
..... (3) dan telah disetor tanggal (4) adalah sebagai berikut :

U R A I A N (1)	MAP/KJS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPh yang dipotong/ dipungut/disetor sendiri (Rp) (5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
• Yang ditempatkan di DN	411128/404			
• Yang ditempatkan di LN	411128/404			
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia				
c. Jasa Giro				
2. Transaksi Penjualan Saham :				
a. Saham Pendiri	411128/407			
b. Bukan Saham Pendiri	411128/406			
3. Bunga/Diskonto Obligasi	411128/401			
4. Hadiah Undian	411128/405			
5. Persewaan Tanah dan atau Bangunan (Bagi Penyewa sebagai Pemotong Pajak)	411128/403			
6. Persewaan Tanah dan atau Bangunan (Bagi Wajib Pajak pengusaha persewaan Tanah dan/atau Bangunan):				
a. PPh yang disetor sendiri	411128/403			
b. PPh yang dipotong oleh pihak lain				
7. Penyerahan Jasa Konstruksi Usaha Kecil (bagi penerima jasa sebagai pemotong pajak)	411128/409			
8. Penyerahan Jasa Konstruksi Usaha Kecil (bagi Wajib Pajak pengusaha kecil jasa konstruksi) :				
a. PPh yang disetor sendiri	411128/409			
b. PPh yang dipotong oleh pihak lain				
J U M L A H				
Terbilang				

C. Lampiran : (a)

- () Surat Setoran Pajak lembar ke-3
- () Daftar Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)
- () Surat Kuasa Khusus

D. Pernyataan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

..... 20...
Pemotong Pajak/Wajib Pajak/Kuasa (b)
Tanda tangan, nama dan cap

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PAJAK TENTANG TATA CARA
PEMOTONGAN, PENYILOTORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS DISKONTO SURAT
PERBENDAHARAAN NEGARA

Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak yang dipotong
Lembar ke-2 untuk Penyelenggara Bursa Efek
Lembar ke-3 untuk Arsip Pemotong Pajak
Lembar ke-4 untuk Pembeli/Pemegang SPN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS DISKONTO
SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA

NOMOR :

N P W P

Nama Wajib Pajak

Alamat

Uraian		Diskonto
(1)		(2)
a.	Nama Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	
b.	Jumlah nilai nominal	
c.	Nomor seri	
d.	Tingkat bunga/tahun	
e.	Tanggal jatuh tempo bunga terakhir	
f.	Tanggal perolehan	
g.	Tanggal penjualan	
h.	Jumlah harga perolehan	
i.	Jumlah harga jual	
j.	Diskonto (i - h)	
Jumlah :		

PPh Final (20% X diskonto SPN) =

Terbilang :

☐ PPh Final tidak dipotong (Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008) (4)

20

Pemotong Pajak :

N P W P

Nama

Tanda tangan, nama dan cap

Perhatian :

1. Setiap nama SPN dengan tanggal perolehan yang berbeda dibuat Bukti Pemotongan tersendiri.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.
3. Bukti Pemotongan tetap dibuat meskipun PPh Final tidak dipotong bagi bank, dana pensiun dan reksadana yang memenuhi syarat.